

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli Tahun 2017 dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan di masa mendatang. Namun demikian, kami berharap semoga Renja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tercapainya visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021, yaitu “Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”.

Gunungsitoli, 30 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA GUNUNGSITOLI,

DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si

PEMBINA

NIP. 19751213 200112 2 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli tentang Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun 2017.....	v
--	---

BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penyajian	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	14
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	17
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD	19
3.3 Indikator Kinerja, Strategi dan Kebijakan SKPD	20
3.4 Program dan Kegiatan	23
BAB IV : PENUTUP.....	24

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016
2. Capaian Indikator Kinerja Pelayanan SKPD
3. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
4. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Lokasi, Pagu Indikatif dan Sumber Dana

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli..... 12

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Realisasi Program dan Kegiatan	6
Tabel 2. Realisasi Anggaran per Program	9
Tabel 3. Rekapitulasi PNS pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli.....	13
Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.....	14
Tabel 5. Indikator Kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli.....	19



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pancasila No. 21 Telp/Fax (0639) 21686
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 503/ 146 /DPMPPTSP/IV/2017

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun 2018, perlu menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun 2018 dengan mempedomani Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/kota;
26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Gunungsitoli Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk periode 1 (satu) tahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Gunungsitoli
pada Tanggal 30 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA GUNUNGSITOLI,



DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19751213 200112 2 005

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Gunungsitoli
d.p. Bapak Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
2. Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.
3. Perangkat Daerah Bapedda Kota Gunungsitoli.
4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga salah satu tolokukur keberhasilan otonomi daerah adalah kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional serta mewujudkan kedulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil. Selanjutnya, dalam menghadapi perekonomian global perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli sebagai unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Instansi Pemerintah Kota Gunungsitoli mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinjadengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tercapainya Visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021, yaitu “Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing”.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/kota;
26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renjaini adalah sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

RenjaDPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2018.
- 2) Sebagai instrumen bagi setiap pegawai padaDPMPPTSP Kota Gunungsitolidalammemahami arah kebijakan pada tahun 2018 untuk pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Mewujudkan sinkronisasi penjabaran RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2018.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian RenjaDPMPPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

1) Bab IPendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penyajian

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2) Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

3) Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Indikator Kinerja dan Strategi Renja Perangkat Daerah

Perumusan indikator kinerja dan strategi didasarkan atas rumusan tujuan dan sasaran kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.4 Program dan Kegiatan

Berisikan mengenai rencana program dan kegiatan, lokasi dan kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

4) Bab IV Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan untuk mencapai sasaran strategis, sebelumnya Pemerintah Kota Gunungsitoli telah membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Gunungsitoli sebagai unit penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli dan pada tahun 2016 BPPT Kota Gunungsitoli telah melaksanakan 6 (enam) program yang meliputi 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Realisasi anggaran program dan kegiatan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Realisasi Program dan Kegiatan

Sasaran : Terwujudnya pelayanan administrasi perizinan yang berkualitas				
Indikator Kinerja : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan.				
Program I : Pelayanan Administrasi Perkantoran.				
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	5.499.500	99,99
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.000.000	130.639.976	93,31
3	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.250.000	1.355.600	25,82
4	Penyediaan Jasa Kebersihan	19.200.000	19.200.000	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000	99.978.450	99,98
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	79.984.750	99,98
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.742.000	97,42
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	4.449.000	88,98
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	90.000.000	89.531.500	99,48
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	155.000.000	95.770.650	61,79
11	Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	110.000.000	77.400.000	70,36
12	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	85.250.000	85.250.000	100

13	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	57.600.000	57.600.000	100
14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	19.200.000	19.200.000	100
15	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	21.000.000	21.000.000	100
16	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	7.000.000	6.883.800	98,34
TOTAL.....		910.000.000	803.485.226	88,30%

Sasaran : Terpenuhi dan terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perizinan.				
Indikator Kinerja : Tingkat pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan.				
Program II : Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur.				
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pengadaan Meubelair	10.000.000	9.655.000	96,55
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	47.430.000	94,86
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50.000.000	48.508.000	97,02
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	50.000.000	42.170.000	84,34
TOTAL.....		160.000.000	147.763.000	92,35

Sasaran : Meningkatnya disiplin aparatur pelayanan.				
Indikator Kinerja : Peningkatan disiplin aparatur.				
Program III : Program Peningkatan Disiplin Aparatur.				
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	30.000.000	23.007.600	76,69
TOTAL.....		30.000.000	23.007.600	76,69

Sasaran : Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pelayanan.				
Indikator Kinerja : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.				
Program IV : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.				
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Mengikuti Kegiatan Diklat/Bimtek/ Worskhop/ Kursus/Sosialisasi di Dalam dan Luar Daerah	100.000.000	87.395.400	87,40
TOTAL.....		100.000.000	87.395.400	87,40

Sasaran : Tersusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 sebanyak 1 dokumen

Indikator Kinerja : Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 sebanyak 1 dokumen				
Program V : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Penyusunan Renstra SKPD	7.500.000	7.485.000	98,80
TOTAL.....		7.500.000	7.485.000	98,80

Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalnya pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan. - Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara BPPT Kota Gunungsitoli dengan SKPD terkait. - Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan.
Indikator Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan pelayanan perizinan kepada masyarakat. - Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi perizinan dan non perizinan dengan SKPD terkait - Jumlah peraturan/ketentuan di bidang pelayanan perizinan.
Program VI : Program Pelayanan Perizinan	

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Publikasi Layanan Perizinan Melalui Media Elektronik	20.000.000	19.995.000	99,98
2	Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan	60.000.000	55.951.000	93,25
3	Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	40.000.000	39.636.350	99,09
4	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat	100.000.000	95.892.000	95,89
5	Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	45.000.000	43.212.600	96,03
6	Pengurusan Perizinan secara langsung di Kecamatan	60.000.000	59.954.000	99,92
7	Penanganan Pengaduan Masyarakat	35.000.000	34.996.500	99,99
8	Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	105.000.000	103.611.000	98,68
9	Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	20.000.000	19.957.500	99,79
TOTAL.....		485.000.000	473.208.950	97,56

Tabel 2. Realisasi Anggaran per Program

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16	910.000.000	803.485.226	88,30%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	160.000.000	147.763.000	92,35
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	30.000.000	23.007.600	76,69
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100.000.000	87.395.400	87,40

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	7.500.000	7.485.000	98,80
6	Program Pelayanan Perizinan	9	485.000.000	473.208.950	97,56
Jumlah Keseluruhan.....		32	1.692.500.000	1.542.342.176	91,13

Total anggaran yang dikelola BPPT Kota Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp.1.692.500.000,-**(satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terealisasi adalah sebesar **Rp.1.542.342.176,-** (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah). Maka pencapaian kinerja BPPT Kota Gunungsitoli berdasarkan realisasi anggaran adalah :

$$\text{Realisasi Anggaran} = \frac{1.542.342.176}{1.692.500.000} \times 100\% = \mathbf{91,13\%}$$

Berdasarkan persentase realisasi anggaran, yakni sebesar **91,13%** dan sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar **Rp.150.157.824,-**(seratus lima puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) atau **8,87%**.

Adapun program/kegiatan pada BPPT Kota Gunungsitoli tahun 2016 yang tidak terlaksana, sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan kegiatan Penyebarluasan informasi pembangunan daerah kota Gunungsitoli dengan pagu Rp. 7.500.000,-/Tahun

2.1.2 Pencapaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2016 serta perkiraan capaian pelaksanaan sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran tabel C.1.3

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Unsur-Unsur Penting Dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, maka kedudukan, tugas dan fungsi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Gunungsitoli.

2. Tugas Pokok

DPMPPTSP Kota Gunungsitoli diberikan tugas pokok, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BPPT Kota Gunungsitoli menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- 2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, kerja sama dan produktifitas tenaga kerja.
- 4) Penyelenggaraan penanganan pengaduan, penyusunan kebijakan, harmonisasi, pemberian advokasi layanan dan informasi perizinan dan nonperizinan, pengolahan data, penyusunan laporan, penyuluhan serta pengembangan sistem informasi dan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan.
- 5) Perencanaan dan penyusunan program di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- 6) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- 7) Pembinaan administrasi dan teknis di Bidang Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

B) Aspek Strategis

Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Gunungsitoli, ditetapkan fokus utama prioritas pembangunan sebagai berikut :

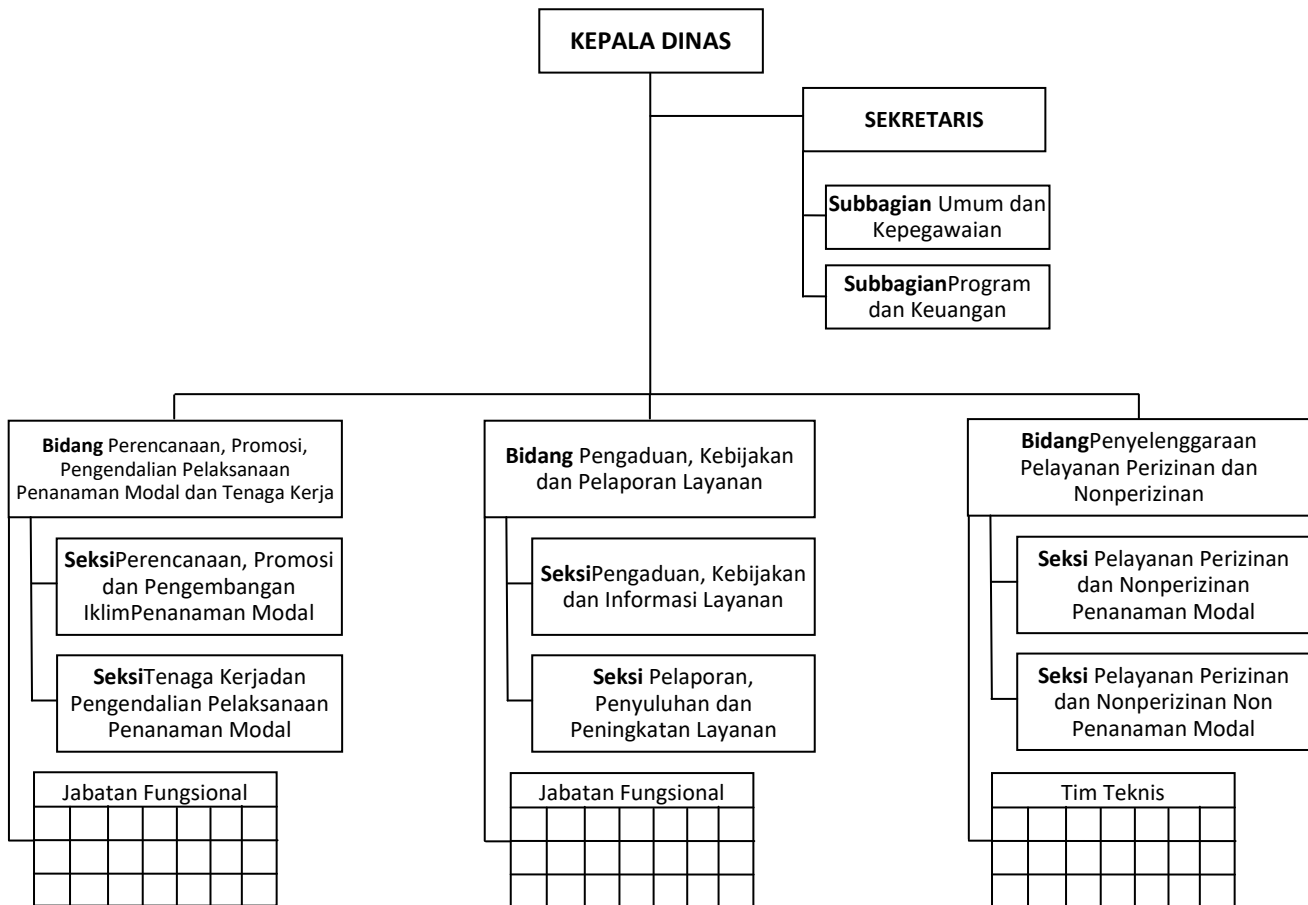
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Pengembangan infrastruktur strategis berbasis kewilayahan.
3. Pengembangan pendidikan berkualitas dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.
4. Peningkatan derajat kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat.
5. Pengembangan perekonomian daerah berbasis perdagangan, jasa dan industri.

Prioritas pembangunan yang terkait tugas dan fungsi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli adalah prioritas pertama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C) Kelembagaan

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli sesuai dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dibantu oleh :

- 1) Sekretaris Dinas, dengan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi. Sekretaris Dinas membawahi 2 (dua) Kepala Sub bagian, antara lain :
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian, dengan tugas : melaksanakan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan dan pelaporan terkait bidang umum dan kepegawaian.
 - b. Kasubbag program dan Keuangan, dengan tugas Melaksanakan penghimpunan, penyusunan, pengelolaan dan pelaporan terkait program dan keuangan.
- 2) Kepala Bidang Perencanaan, Promosi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, promosi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan tenaga kerja. Kepala Bidang Perencanaan, Promosi, Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja membawahi 2 (dua) seksi dan Jabatan Fungsional yaitu :

- a. Kepala Seksi Perencanaan, Promosi Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi perencanaan, promosi dan pengembangan iklim penanaman modal dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan dan menyiapkan pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan, promosi dan pengembangan iklim penanaman modal daerah.
 - b. Kepala Seksi Tenaga Kerja dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi tenaga kerja dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan dan menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan, kerja sama dan produktifitas tenaga kerja serta pengendalian, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
 - c. Jabatan fungsional.
- 3) Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, memverifikasi dan mengendalikan penanganan pengaduan, penyusunan kebijakan, harmonisasi, pemberian advokasi layanan dan informasi perizinan dan nonperizinan, pengolahan data, penyusunan laporan, penyuluhan kepada masyarakat serta pengembangan sistem informasi dan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi 2 (dua) seksi dan Jabatan Fungsional yaitu :
- a. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Layanan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi pengaduan, kebijakan dan informasi layanan dalam merencanakan, melaksanakan,

- mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan dan menyiapkan penanganan pengaduan, penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta informasi perizinan dan nonperizinan.
- b. Kepala Seksi Pelaporan, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi pelaporan, penyuluhan dan peningkatan layanan dalam merencanakan, menyiapkan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan, mengembangkan dan melaksanakan pengolahan data, penyusunan laporan, penyuluhan kepada masyarakat serta pengembangan sistem informasi dan peningkatan layanan perizinan dan nonperizinan.
 - c. Jabatan fungsional
- 4) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam merencanakan, melaksanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, melaporkan, mengadministrasi pelayanan dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan membawahi 2 (dua) seksi dan Tim Teknis yaitu :
- a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan, menyiapkan, mengadministrasi pelayanan dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Non Penanaman Modal mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan non penanaman modal dalam merencanakan, melaksanakan, mengumpulkan, mengidentifikasi, merumuskan, menyiapkan,

mengadministrasi pelayanan dan menerbitkan perizinan dan nonperizinan non penanaman modal.

c. Tim Teknis

2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, DPMPPTSP Kota Gunungsitoli didukung oleh sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang. Rekapitulasi PNS pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Rekapitulasi PNS pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Golongan dan Eselon

No.	Jabatan	Jumlah	Pendidikan				Golongan			Eselon			
			S2	S1	D3	SLTA	IV	III	II	II	III	IV	Non
1	2	3	4				5			6			
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
3	Kepala Bidang	3	-	3	-	-	1	2	-	-	3	-	-
4	Kasubbag	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2	-
5	Kasi	6	1	5	-	-	-	6	-	-	-	3	-
6	Staf	27	-	10	5	6	-	13	8	-	-	-	24
Jumlah Keseluruhan		34	2	20	5	7	2	24	8	1	4	5	24
			34				34			34			

3. Sarana dan Prasarana

Tabel 4. Sarana dan Prasarana pada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

No.	Nama Barang	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Pertapakan Kantor Camat Baru Jl. Pancasila)	1 Unit
2	Portable Generating Set	1 Unit
3	Mini Bus	1 Unit
4	Scooter	4 Unit
5	Filling Besi/Metal	9 Unit
6	Brankas	2 Unit
7	Lemari Kaca (Rak Buku)	2 Unit
8	Papan Pengumuman/Struktur organisasi	1 Unit
9	Papan Pengumuman/informasi perizinan	1 Unit
10	Papan Pengumuman/DUK	1 Unit
11	Papan Pengumuman/white board	1 Unit
12	Alat penghancur kertas	2 Unit
13	Lemari Kayu	4 Unit
14	Meja Rapat	1 Unit
15	Kursi Tamu (kursi gandeng)	3 Unit
16	Kursi Putar	9 Unit

17	Kursi Biasa	12 Unit
18	Kursi Lipat	36 Unit
19	Meja ½ biro	19 Unit
20	Sofa	2 Unit
21	Kain Gorden	2 Unit
22	Taplak meja	11 Unit
23	AC Spilt	3 Unit
24	Kipas Angin	10 Unit
25	Televisi	2 Unit
26	Stabilisator	2 Unit
27	Tustel (camera digital)	6 Unit
28	Dispencer	2 Unit
29	Handy cam	1 Unit
30	Laptop	5 Unit
31	Note book	12 Unit
32	Hard disk	2 Unit
33	External (DVD RW)	10 Unit
34	Printer	15 Unit
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit
36	Meja kerja pejabat Eselon II	1 Unit
37	Meja kerja pejabat Eselon III	2 Unit
38	Lemari arsip dinamis	8 Unit
39	Papan nama instansi	1 Unit
40	LAN	2 Unit
41	Internet	1 Unit
42	Proyektor + Attachment (infocus)	1 Unit
43	Compact Disc Player	1 Unit
44	Lain-lain (CCTV)	1 Paket
45	Sound system	1 Unit
46	Facsimile	1 Unit
47	Handphone	2 Unit
48	Antena SHF Stationary	1 Unit
49	Receiver STL/VHF (digital parabola)	1 Unit
50	UPS	5 Unit
51	Aplikasi sistem kearsipan	1 Unit
52	Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1 KVA	1 Paket
53	Lain-lain/Buku peraturan perundang-undangan	36 Buah

2.2.2 AnalisisCapaian Indikator KinerjaPelayanan Perangkat Daerah

Adapun capaian indikator kinerja pelayanan pada BPPT Kota Gunungsitoli berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Kota Gunungsitoli kurun waktu tahun 2011 s.d 2016 disajikan pada Lampiran Tabel C.1.2.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, DPMPTSP Kota Gunungsitoli tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia.
- 2) Dari 58 jenis perizinan pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli, masih 2 (dua) jenis perizinan yang sudah diatur dalam regulasi/produk hukum Pemerintah Kota Gunungsitoli, yaitu :
 - a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - b. Izin Tempat Usaha Fasilitas Pasar yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.Sehingga untuk jenis perizinan yang belum diatur dalam regulasi/produk hukum Pemerintah Kota Gunungsitoli, maka pemberian izin beserta penetapan persyaratannya berpedoman kepada Peraturan Menteri yang bersesuaian dan peraturan perundang-undangan di atas Peraturan Daerah.
- 3) Belum optimalnya koordinasi DPMPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait dan hingga saat ini Tim Teknis masih belum ditempatkan di DPMPTSP Kota Gunungsitoli, tetapi masih berkantor pada Perangkat Daerah asal.

Sebagai tindak lanjut kendala tersebut, DPMPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan langkah-langkah antisipatif, antara lain :

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
- 2) Mendorong Perangkat Daerah Teknis lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Walikota Gunungsitoli untuk melakukan percepatan penyusunan regulasi mengenai perizinan yang telah didelegasikan kewenangan penyelenggaraannya kepada DPMPTSP Kota Gunungsitoli.
- 3) Membangun dan meningkatkan koordinasi antara DPMPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait melalui rapat koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan konsolidasi dengan Tim Teknis.

Adapun beberapa hal yang telah dilakukan DPMPTSP Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan kinerja pelayanan, antara lain :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi perizinan dengan Perangkat Daerah terkait dan Tim Teknis secara berkala dan berkelanjutan.
- 2) melakukan percepatan penyusunan regulasi mengenai perizinan yang telah didelegasikan kewenangan penyelenggaraannya kepada DPMPTSP Kota Gunungsitoli.
- 3) Menyelenggarakan pelayanan pengaduan pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli.
- 4) Melakukan pelayanan perizinan langsung masyarakat di tingkat Kecamatan.
- 5) Melakukan pelayanan tenaga kerjapada DPMPTSP Kota Gunungsitoli.
- 6) Melakukan monitoring pelaksanaan perizinan dan nonperizinan.
- 7) Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengetahui tingkat kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli terhadap pelayanan publik secara berkala.
- 8) Melaksanakan pengembangan aplikasi pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli.
- 9) Meningkatkan pelayanan informasi dan promosi perizinan melalui brosur, spanduk/baliho, website dan media elektronik (radio).

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Adapun uraian yang membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan disajikan pada Lampiran C.1.5

2.5 PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat dilihat pada Lampiran Tabel C.1.7 dan Tabel C.9

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah “Penyiapan Landasan Pembangunan Yang Kokoh” yang dicirikan dengan peningkatan pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien.

Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2018, salah satu prioritas pembangunan daerah Kota Gunungsitoli adalah “pengembangan kualitas pelayanan publik yang didukung dengan sumber daya aparatur daerah yang memiliki etos kerja dan kapabilitas dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Merujuk kepada hal tersebut, DPMPPTSP Kota Gunungsitoli yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli mempunyai kedudukan dan peran strategis sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Instansi Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan tugas pokoknya yaitu “melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian”.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.2.1 Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan.

DPMPPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

- 2) Peningkatan koordinasi antara DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan serta mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- 4) Penyederhanaan prosedur dan standarisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan untuk dapat lebih mudah, sederhana, cepat dan transparan.
- 5) Pengembangan sistem informasi Pelayanan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.
- 6) Peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam proses pemberian Pelayanan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

DPMPPTSP Kota Gunungsitoli menetapkan sasaran berdasarkan tujuannya, yaitu :

- 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan.
- 2) Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah teknis terkait.
- 3) Terwujudnya pelayanan administrasi Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan yang berkualitas dan optimalnya pembinaan penyelenggaraan pelayanan.
- 4) Terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan sederhana.
- 5) Terwujudnya pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.
- 6) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam proses pemberian pelayanan perizinan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis suatu organisasi. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka indikator kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Indikator Kinerja DPMPPTSP Kota Gunungsitoli

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan indikator kinerja : - Jumlah aparatur PNS yang mengikuti kegiatan bmttek/diklat/workshop/seminar/magang.
2	Peningkatan koordinasi DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah teknis terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.	Terwujudnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara DPMPPTSP Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait.	Persentase peningkatan koordinasi perizinan dan non perizinan dengan Perangkat Daerah terkait, dengan indikator kinerja: - Frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi perizinan dan non perizinan dengan SKPD terkait.
3.	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perizinan dan mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan.	Terwujudnya pelayanan administrasi perizinan yang berkualitas dan optimalnya pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perizinan, dengan indikator kinerja : 1. Jumlah jenis perizinan yang didelegasikan kepada DPMPPTSP Kota Gunungsitoli 2. Jumlah dokumen Izin yang diterbitkan. 3. Pelayanan langsung di Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pembinaan pelayanan perizinan kepada masyarakat.
4	Penyederhanaan prosedur dan standarisasi Pelayanan Perizinan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan.	Terwujudnya pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perizinan, dengan indikator kinerja : - Jumlah peraturan/ketentuan di bidang pelayanan perizinan. - Jumlah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan secara langsung.
5	Pengembangan sistem informasi Pelayanan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.	Terwujudnya pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.	Persentase peningkatan sistem informasi pelayanan perizinan, dengan indikator kinerja : - Jumlah jenis aplikasi pelayanan perizinan. - Jumlah jenis media publikasi layanan perizinan.
6	Peningkatan pemantauan dan evaluasi dalam proses pemberian pelayanan perizinan.	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi dalam proses pemberian pelayanan perizinan.	Persentase peningkatan pemantauan dan evaluasi atas pemberian pelayanan perizinan, dengan indikator kinerja : - Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi perizinan. - Jumlah dokumen laporan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .

7	Meningkatkan daya tarik investasi	Meningkatnya minat investasi melalui promosi dan penyediaan informasi	Meningkatkan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (perusahaan) dengan indikator kinerja: <ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya pameran investasi daerah - Keikutsertaan dalam Kegiatan Promosi Investasi - Adanya sarana dan prasarana promosi investasi daerah - Terpublikasinya layanan perizinan melalui media elektronik - Adanya brosur-brosur perizinan dan nonperizinan - Adanya kalender perizinan
8	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya pertumbuhan investasi di daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp) dengan indikator kinerja : <ul style="list-style-type: none"> -Tersusunnya buku kajian potensi investasi daerah -Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penanaman Modal Daerah -Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Insentif Penanaman Modal Daerah -Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah
9	Menyediakan tenaga kerja yang kompeten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sumber daya manusia tenaga kerja yang berkualitas 2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja 3. Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja 	Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator kinerja: <ul style="list-style-type: none"> -Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

3.3.2 Strategi

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan selama 5 (lima) tahun. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Untuk mencapai kinerja pelayanan, DPMPPTSPKota Gunungsitoli menetapkan beberapa strategi yang akan ditempuh, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan peran kelembagaan yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berkompeten di bidangnya.
- 2) Pembentukan komitmen dan konsistensi aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- 3) Peningkatan koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli dengan Perangkat Daerah terkait.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan terjangkau.
- 5) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam mendukung penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- 6) Peningkatan pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- 7) Pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 8) Penyederhanaan prosedur dan standarisasi pelayanan perizinan.
- 9) Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
- 10) Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja pelayanan dan indeks kepuasan masyarakat.

3.3.3 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan DPMPPTSP Kota Gunungsitoli antara lain :

- 1) Mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
- 2) Meningkatkan fungsi koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- 3) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).
- 4) Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur untuk mendorong keberhasilan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
- 5) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan PTSP dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun pemahaman yang optimal.
- 7) Membangun komitmen dan konsistensi seluruh aparatur pelayanan terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam menciptakan iklim usaha/investasi yang kondusif.

- 8) Mengembangkan dan meningkatkan data dan sistem informasi pelayanan perizinan melalui pemanfaatan Teknologi informasi dan telekomunikasi.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan dan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
- 10) Mengikuti pelaksanaan Diklat, Bimtek, Lokakarya, Workshop, Sosialisasi dan kegiatan sejenis lainnya.
- 11) Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Teknis.

Ada 10 (sepuluh) program yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) kegiatan yang akan dilaksanakan DPMPPTSP Kota Gunungsitoli pada tahun 2018, sebagai berikut :

- I) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
 1. penyediaan jasa surat menyurat;
 2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 3. pemeliharaan jasa dan perizinan kendaraan dinas operasional;
 4. pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 5. penyediaan jasa kebersihan kantor;
 6. penyediaan alat tulis kantor;
 7. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 8. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 9. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 10. penyediaan makanan dan minuman;
 11. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 12. monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
 13. penyediaan jasa administrasi umum;
 14. penyediaan jasa administrasi kantor;
 15. penyediaan jasa keamanan kantor;
 16. penyediaan jasa supir/kernet/operator alat berat;
 17. penyediaan peralatan kebersihan kantor.
- II) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
 1. pengadaan meubelair;
 2. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 3. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 4. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- III) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, meliputi kegiatan :
 1. pengadaan pakaian pegawai

- IV) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan :
1. mengikuti kegiatan diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi di dalam dan luar daerah.
- V) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, meliputi kegiatan :
1. keikutsertaan dalam kegiatan promosi investasi;
 2. pembuatan sarana dan prasarana promosi investasi;
 3. publikasi layanan perizinan melalui media elektronik;
 4. pembuatan brosur-brosur perizinan dan nonperizinan;
 5. pembuatan kalender perizinan.
- VI) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, meliputi kegiatan :
1. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang fasilitas dan insentif penanaman modal daerah;
 2. penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM);
- VII) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi kegiatan :
1. pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.
- VIII) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, meliputi kegiatan :
1. penyusunan informasi bursa tenaga kerja;
 2. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
- IX) Program Pelayanan Perizinan, meliputi kegiatan :
1. pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM);
 2. sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 3. pelayanan perizinan secara langsung di kecamatan;
 4. penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 5. pengembangan sistem informasi perizinan;
 6. pengelolaan perizinan oleh tim teknis;
- X) Program Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan, meliputi kegiatan :
1. rapat koordinasi tim dewan pengupahan kota dan sekretariat dewan pengupahan kota Gunungsitoli;
 2. fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 3. pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenagakerja;
 4. sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;
 5. pembinaan LKS (lembaga kerjasama) TRIPARTIT;

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi, pagu indikatif dan perkiraan maju rencana tahun 2019 dapat dilihat pada tabel C.1.8

Selanjutnya rencana program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi, pagu indikatif dan sumber dana untuk tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 1

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2018.

Renja ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kota Gunungsitoli dan instrumen bagi setiap pegawai pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli dalam memahami arah kebijakan dan tujuan organisasi pada tahun 2018.

Akhirnya, kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan gambaran terhadap rencana kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Gunungsitoli pada tahun 2018 serta dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya yang disertai dengan semakin meningkatnya dukungan dari Walikota Gunungsitoli, Wakil Walikota Gunungsitoli, DPRD Kota Gunungsitoli dan seluruh stakeholder sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tercapainya visi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli terpilih periode 2016-2021, yaitu "Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman dan Berdaya Saing".

Gunungsitoli, 30 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA GUNUNGSITOLI,



DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si
PEMBINA

NIP. 19751213 200112 2 005

LAMPIRAN - LAMPIRAN

TABEL C.1.2
PENCAPAIN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				tahun 2016 (thn n-2)	tahun 2017 (thn n-1)	tahun 2018 (thn n)	tahun 2019 (thn n+1)	tahun 2016 (thn n-2)	tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran											
1	Penyediaan Jasa surat menyurat		Tersedianya biaya materai, perangko/benda pos lainnya dan biaya paket/pengiriman	6 Tahun	4 jenis	4 jenis	4 jenis	6 Tahun	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya biaya rekening listrik, telepon, faximili, air dan internet	6 Tahun	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 Tahun	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas/operasional	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tersedianya upah tenaga petugas kebersihan	4 Tahun	1 orang	1 orang	1 orang	4 Tahun	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
5	Penyediaan alat tulis kantor		Tersedianyabiaya alat tulis kantor	6 Tahun	90 jenis	90 jenis	90 jenis	6 Tahun	90 jenis	90 jenis	90 jenis	90 jenis
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 Tahun	11 jenis	12 jenis	12 jenis	5 Tahun	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Tahun	10 jenis	12 jenis	12 jenis	5 Tahun	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis
8	Penyediaan bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya buku bacaan, surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	5 Tahun	2 jenis	2 jenis	2 jenis	5 Tahun	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis
9	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat	5 Tahun	34 orang	34 orang	34 orang	5 Tahun	34 orang	34 orang	34 orang	34 orang
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah kota Gunungsitoli	5 Tahun	90 OH	90 OH	90 OH	5 Tahun	90 OH	90 OH	90 OH	90 OH
11	Monitoring/Survey/Pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan lainnya	5 Tahun	500 OH	500 OH	500 OH	6 Tahun	500 OH	500 OH	500 OH	500 OH
12	Penyediaan jasa administrasi umum		Tersedianya honorarium pengelola administrasi umum	5 Tahun	13 orang	13 orang	13 orang	5 Tahun	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang
13	Penyediaan Jasa Administrasi kantor		Tersedianya upah tenaga administrasi kantor	3 Tahun	3 orang	3 orang	3 orang	3 Tahun	2 orang	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun
14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		Tersedianya upah tenaga petugas jaga malam	4 Tahun	1 Orang	1 orang	1 orang	4 Tahun	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
15	Penyediaan Jasa Supir/Kemet/Operator Alat Berat		Tersedianya upah tenaga supir	4Tahun	1 Orang	1 orang	1 orang	4 Tahun	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
16	Penyediaan peralatan kebersihan kantor		Tersedianya peralatan kebersihan kantor	5 Tahun	25 jenis	25 jenis	25 jenis	5 Tahun	25 jenis	25 jenis	25 jenis	25 jenis
17	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja		Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik	4 Tahun	-	-	-	4 Tahun	-	-	-	-
18	Penyediaan jasa jaringan Internet		Lancarnya penyediaan informasi yang dibutuhkan	4 Tahun	-	-	-	4 Tahun	-	-	-	-

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				tahun 2016 (thn n-2)	tahun 2017 (thn n-1)	tahun 2018 (thn n)	tahun 2019 (thn n+1)	tahun 2016 (thn n-2)	tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
2	Terpenuhi dan terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perizinan											
1	Pengadaan Meubelair		Tersedianya meubelair kantor	5 Tahun	3 jenis	3 jenis	3 jenis	5 Tahun	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Tahun	10 jenis	10 jenis	10 jenis	6 Tahun	4 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	6 Tahun	0	0	0	6 Tahun	0	0	0	0
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	4 Tahun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	4 Tahun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan baik	6 Tahun	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	6 Tahun	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis
IV	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan											
4	Terlaksananya Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.											
1	Rapat koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.		Terlaksananya Penetapan Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak)	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
2	Pembinaan LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT		Terlaksananya pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
3	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial		Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
4	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja		Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
5	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur											
5	Meningkatnya disiplin aparatur											
1	Pengadaan Pakaian/Seragam Khusus Perizinan		Tersedianya Pakaian Khusus Perizinan	4 Paket	40 stel	40 stel	40 stel	3 Paket	40 stel	40 stel	40 stel	40 stel
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	2 Paket	-	-	-	0	-	-	-	-
3	Pengadaan Pakaian/Seragam Olahraga		Tersedianya Pakaian Olahraga	4 Paket	-	-	-	0	-	-	-	-
VI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
6	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan											
1	Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/ Sosialisasi		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan	6 Tahun	50 OH	50 OH	50 OH	6 Tahun	50 OH	50 OH	50 OH	50 OH
VII	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan											
7	Terlaksananya Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.											
1	Rapat koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.		Terlaksananya Penetapan Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak)	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
2	Pembinaan LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT		Terlaksananya pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				tahun 2016 (thn n-2)	tahun 2017 (thn n-1)	tahun 2018 (thn n)	tahun 2019 (thn n+1)	tahun 2016 (thn n-2)	tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial		Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
4	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja		Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
5	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	-	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan
Program Pelayanan Perizinan												
Meningkatnya pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan												
1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan		Tersusunnya SOP Pelayanan Perizinan	4 Dokumen	1 draft	-	1 draft	3 Dokumen	1 draft	-	1 draft	1 draft
2	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat		Terseleenggaranya Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat	4x 6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kec	6 Kec	5 x 6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kec	6 Kec	6 Kec
3	Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
4	Pengurusan Perizinan secara langsung di Kecamatan		Terlaksananya Pelayanan Perizinan secara langsung di Kecamatan	8 Kecamatan	4 kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	11 Kecamatan	5 kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan
5	Pengembangan Sistem Informasi Perizinan		Adanya pengembangan Sistem Informasi Perizinan	-	1 paket	-	-	-	1 paket	-	-	1 paket
6	Pengelolaan perizinan oleh Tim Teknis		Terbitnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan rekomendasi	-	35 orang	40 orang	40 orang	-	35 orang	40 orang	40 orang	40 orang
7	Rapat koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		Terlaksananya rapat koordinasi di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan SKPD Terkait	4 Kali	1 kali	1 kali	-	13 Kali	-	1 kali	-	1 kali
8	Fasilitasi rapat-rapat Tim Teknis		Terlaksananya rapat-rapat Tim Teknis	4 Tahun	-	-	-	4 Tahun	-	-	-	4 Tahun
9	Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan		Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat	4 Tahun	-	-	-	4 Tahun	-	-	-	4 Tahun
10	Publikasi Pelayanan Perizinan melalui media elektronik		Meningkatnya indormasi pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui media elektronik	5 Paket	650 kali siar	-	-	3 Paket	-	-	-	3 Paket
11	Penyusunan Standar Pelayanan (SP)		Tersusunnya Standar Pelayanan (SP)	2 Dokumen	1 draft	1 draft	-	2 Dokumen	1 draft	1 draft	-	1 draft

Gunungsitoli, 30 Maret 2017

F KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA GUNUNGSITOLI,



DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si
PENGUNGSITOLI
NIP. 19751213 200112 2 005

TABEL C.1.2
PENCAPAIN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				tahun 2016 (thn n-2)	tahun 2017 (thn n-1)	tahun 2018 (thn n)	tahun 2019 (thn n+1)	tahun 2016 (thn n-2)	tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran											
1	Penyediaan Jasa surat menyurat		Tersedianya biaya materai, perangko/benda pos lainnya dan biaya paket/pengiriman	6 Tahun	4 jenis	4 jenis	4 jenis	6 Tahun	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Tersedianya biaya rekening listrik, telepon, faximili, air dan internet	6 Tahun	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 Tahun	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas/operasional	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tersedianya upah tenaga petugas kebersihan	4 Tahun	1 orang	1 orang	1 orang	4 Tahun	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
5	Penyediaan alat tulis kantor		Tersedianyabiaya alat tulis kantor	6 Tahun	90 jenis	90 jenis	90 jenis	6 Tahun	90 jenis	90 jenis	90 jenis	90 jenis
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 Tahun	11 jenis	12 jenis	12 jenis	5 Tahun	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 Tahun	10 jenis	12 jenis	12 jenis	5 Tahun	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis
8	Penyediaan bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya buku bacaan, surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	5 Tahun	2 jenis	2 jenis	2 jenis	5 Tahun	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis
9	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat	5 Tahun	34 orang	34 orang	34 orang	5 Tahun	34 orang	34 orang	34 orang	34 orang
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah kota Gunungsitoli	5 Tahun	90 OH	90 OH	90 OH	5 Tahun	90 OH	90 OH	90 OH	90 OH
11	Monitoring/Survey/Pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan lainnya	5 Tahun	500 OH	500 OH	500 OH	6 Tahun	500 OH	500 OH	500 OH	500 OH
12	Penyediaan jasa administrasi umum		Tersedianya honorarium pengelola administrasi umum	5 Tahun	13 orang	13 orang	13 orang	5 Tahun	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang
13	Penyediaan Jasa Administrasi kantor		Tersedianya upah tenaga administrasi kantor	3 Tahun	3 orang	3 orang	3 orang	3 Tahun	2 orang	3 Tahun	3 Tahun	3 Tahun
14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		Tersedianya upah tenaga petugas jaga malam	4 Tahun	1 Orang	1 orang	1 orang	4 Tahun	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
15	Penyediaan Jasa Supir/Kemet/Operator Alat Berat		Tersedianya upah tenaga supir	4Tahun	1 Orang	1 orang	1 orang	4 Tahun	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang
16	Penyediaan peralatan kebersihan kantor		Tersedianya peralatan kebersihan kantor	5 Tahun	25 jenis	25 jenis	25 jenis	5 Tahun	25 jenis	25 jenis	25 jenis	25 jenis
17	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja		Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik	4 Tahun	-	-	-	4 Tahun	-	-	-	-
18	Penyediaan jasa jaringan Internet		Lancarnya penyediaan informasi yang dibutuhkan	4 Tahun	-	-	-	4 Tahun	-	-	-	-

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				tahun 2016 (thn n-2)	tahun 2017 (thn n-1)	tahun 2018 (thn n)	tahun 2019 (thn n+1)	tahun 2016 (thn n-2)	tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
2	Terpenuhi dan terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan perizinan											
1	Pengadaan Meubelair		Tersedianya meubelair kantor	5 Tahun	3 jenis	3 jenis	3 jenis	5 Tahun	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Tahun	10 jenis	10 jenis	10 jenis	6 Tahun	4 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	6 Tahun	0	0	0	6 Tahun	0	0	0	0
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	4 Tahun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	4 Tahun	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan baik	6 Tahun	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	6 Tahun	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis
IV	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan											
4	Terlaksananya Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.											
1	Rapat koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.		Terlaksananya Penetapan Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak)	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
2	Pembinaan LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT		Terlaksananya pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
3	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial		Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
4	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja		Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
5	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur											
5	Meningkatnya disiplin aparatur											
1	Pengadaan Pakaian/Seragam Khusus Perizinan		Tersedianya Pakaian Khusus Perizinan	4 Paket	40 stel	40 stel	40 stel	3 Paket	40 stel	40 stel	40 stel	40 stel
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	2 Paket	-	-	-	0	-	-	-	-
3	Pengadaan Pakaian/Seragam Olahraga		Tersedianya Pakaian Olahraga	4 Paket	-	-	-	0	-	-	-	-
VI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
6	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan											
1	Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/ Sosialisasi		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan	6 Tahun	50 OH	50 OH	50 OH	6 Tahun	50 OH	50 OH	50 OH	50 OH
VII	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan											
7	Terlaksananya Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.											
1	Rapat koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.		Terlaksananya Penetapan Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak)	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
2	Pembinaan LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT		Terlaksananya pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				tahun 2016 (thn n-2)	tahun 2017 (thn n-1)	tahun 2018 (thn n)	tahun 2019 (thn n+1)	tahun 2016 (thn n-2)	tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial		Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
4	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja		Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
5	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	-	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan
Program Pelayanan Perizinan												
Meningkatnya pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan												
1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan		Tersusunnya SOP Pelayanan Perizinan	4 Dokumen	1 draft	-	1 draft	3 Dokumen	1 draft	-	1 draft	1 draft
2	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat		Terseleenggaranya Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat	4x 6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kec	6 Kec	5 x 6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kec	6 Kec	6 Kec
3	Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
4	Pengurusan Perizinan secara langsung di Kecamatan		Terlaksananya Pelayanan Perizinan secara langsung di Kecamatan	8 Kecamatan	4 kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	11 Kecamatan	5 kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan
5	Pengembangan Sistem Informasi Perizinan		Adanya pengembangan Sistem Informasi Perizinan	-	1 paket	-	-	-	1 paket	-	-	1 paket
6	Pengelolaan perizinan oleh Tim Teknis		Terbitnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan rekomendasi	-	35 orang	40 orang	40 orang	-	35 orang	40 orang	40 orang	40 orang
7	Rapat koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		Terlaksananya rapat koordinasi di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan SKPD Terkait	4 Kali	1 kali	1 kali	-	13 Kali	-	1 kali	-	1 kali
8	Fasilitasi rapat-rapat Tim Teknis		Terlaksananya rapat-rapat Tim Teknis	4 Tahun	-	-	-	4 Tahun	-	-	-	4 Tahun
9	Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan		Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat	4 Tahun	-	-	-	4 Tahun	-	-	-	4 Tahun
10	Publikasi Pelayanan Perizinan melalui media elektronik		Meningkatnya indormasi pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui media elektronik	5 Paket	650 kali siar	-	-	3 Paket	-	-	-	3 Paket
11	Penyusunan Standar Pelayanan (SP)		Tersusunnya Standar Pelayanan (SP)	2 Dokumen	1 draft	1 draft	-	2 Dokumen	1 draft	1 draft	-	1 draft

Gunungsitoli, 30 Maret 2017

F KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA GUNUNGSITOLI,



DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si
PENGUNGSITOLI
NIP. 19751213 200112 2 005

Tabel C.1.3
Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 (tahun berjalan)
Provinsi/Kabupaten/Kota Gunungsitoli

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017				
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
1	20	Otda, Pem. Umum, Adm. Keuda, Prkt Daerah, Kepeg. dan Persandian											
12	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran									
12	01	01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya biaya materai, perangko/benda pos lainnya dan biaya paket/pengiriman	4 jenis	5 Tahun	6 Tahun	6 Tahun	100	4 jenis	3 jenis	75
12	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya rekening listrik, telepon, faximili, air dan internet	6 jenis	4 Tahun	6 Tahun	6 Tahun	100	6 jenis	6 jenis	100
12	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas/operasional	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100
12	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya upah tenaga petugas kebersihan	1 orang	3 Tahun	4 Tahun	4 Tahun	100	1 orang	1 orang	100
12	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianyabiaya alat tulis kantor	90 jenis	4 Tahun	6 Tahun	6 Tahun	100	90 jenis	90 jenis	100
12	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	11 jenis	4 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	100	11 jenis	12 jenis	109
12	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10 jenis	4 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	100	12 jenis	12 jenis	120
12	01	01	15	Penyediaan bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya buku bacaan, surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan	2 jenis	4 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	100	2 jenis	2 jenis	100
12	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, tamu dan rapat	34 orang	4 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	100	34 orang	34 orang	100
12	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah kota Gunungsitoli	90 OH	4 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	100	90 OH	90 OH	100
12	01	01	19	Monitoring/Survey/Pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan lainnya	500 OH	4 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	100	500 OH	500 OH	100
12	01	01	20	Penyediaan jasa administrasi umum	Tersedianya honorarium pengelola administrasi umum	13 orang	4 Tahun	5 Tahun	5 Tahun	100	13 orang	13 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017				
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
12	01	17		Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	0		
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur								
1	20	03	01	Pengadaan Pakaian/Seragam Khusus Perizinan	Tersedianya Pakaian Khusus Perizinan	40 stel	2 Paket	4 Paket	3 Paket	75	40 stel	-	0
1	20	03	03	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	1 Paket	2 Paket	1 Paket	50	-	-	0
1	20	03	04	Pengadaan Pakaian/Seragam Olahraga	Tersedianya Pakaian Olahraga	-	-	4 Paket	-	0	-	-	0
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan								
1	20	05	01	Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/ Sosialisasi	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan	50 OH	5 Tahun	6 Tahun	6 Tahun	100	50 OH	50 OH	100
12	01	17		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terlaksananya Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.								
12	01	17	02	Rapat koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak)	1 Tahun	-	-	-	0	1 Tahun	1 Tahun	100
12	01	17	04	Pembinaan LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT	Terlaksananya pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	1 Kegiatan	-	-	-	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
12	01	17		Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1 Tahun	-	-	-	0	-	-	0
12	01	17		Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	1 Tahun	-	-	-	0	1 Tahun	1 Tahun	100
12	01	17		Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	1 Kegiatan	-	-	-	0	-	-	0
12	01	31		Program Pelayanan Perizinan	Meningkatnya pelayanan perizinan yang mudah, sederhana, cepat dan transparan								
12	01	31	15	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan	Tersusunnya SOP Pelayanan Perizinan	1 draft	3 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	75	1 draft	1 draft	100
12	01	31	06	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat	Terselenggaranya Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat	6 Kecamatan	4 x 6 Kec.	4 x 6 Kecamatan	5 x 6 Kecamatan	125	6 Kec	6 Kec	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2017	
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
12 01 31 14	Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	8 dokumen	200	2 dokumen	2 dokumen	100
12 01 31 16	Pengurusan Perizinan secara langsung di Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Perizinan secara langsung di Kecamatan	4 kecamatan	7 kecamatan	8 Kecamatan	11 Kecamatan	138	4 kecamatan	5 kecamatan	125
12 01 31 17	Pengembangan Sistem Informasi Perizinan	Adanya pengembangan Sistem Informasi Perizinan	1 paket	-	-	-	0	1 paket	1 paket	100
12 01 31 18	Pengelolaan perizinan oleh Tim Teknis	Terbitnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan rekomendasi perizinan	35 orang	-	-	-	0	35 orang	35 orang	100,0
12 01 31	Rapat koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya rapat koordinasi di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dengan SKPD Terkait	1 kali	12 Kali	4 Kali	13 Kali	30	1 kali	-	0
12 01 31	Fasilitasi rapat-rapat Tim Teknis	Terlaksananya rapat-rapat Tim Teknis	-	4 Tahun	4 Tahun	4 Tahun	100	-	-	0
12 01 31	Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan	Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat	-	3 Tahun	4 Tahun	4 Tahun	100	-	-	0
12 01 31	Publikasi Pelayanan Perizinan melalui media elektronik	Meningkatnya indormasi pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui media elektronik	650 kali siar	2 Paket	5 Paket	3 Paket	60	-	-	0
12 01 31	Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	Tersusunnya Standar Pelayanan (SP)	1 draft	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 draft	1 draft	100

Gunungsitoli, 30 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA GUNUNGSITOLI,



DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si
PEMBINA

NIP. 19751213 200112 2 005

Tabel C.1.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017
Kota Gunungsitoli

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	PROGRAM	RANCANGAN AWAL RKPD					PROGRAM	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
		NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa surat menyurat	DPMPPTSP	Tersedianya material, perangkat dan benda pos lainnya	100%	6.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa surat menyurat	DPMPPTSP	Tersedianya material, perangkat dan benda pos lainnya	100%	6.000.000	
		2	Penyediaan alat tulis kantor	DPMPPTSP	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	100%	100.000.000		Penyediaan alat tulis kantor	DPMPPTSP	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	100%	100.000.000	
		3	Pemeliharaan jasa dan perizinan kendaraan dinas operasional	DPMPPTSP	Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	5.000.000		Pemeliharaan jasa dan perizinan kendaraan dinas operasional	DPMPPTSP	Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	5.000.000	
		4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPPTSP	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	80.350.000		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPPTSP	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	80.350.000	
		5	Penyediaan komponen-komponen instalasi, listrik penerangan kantor	DPMPPTSP	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor	100%	10.000.000		Penyediaan komponen-komponen instalasi, listrik penerangan kantor	DPMPPTSP	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor	100%	10.000.000	
		6	Penyediaan bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMPPTSP	Tersedianya biaya bahan bacaan surat kabar	100%	5.010.000		Penyediaan bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMPPTSP	Tersedianya biaya bahan bacaan surat kabar	100%	5.010.000	
		7	Penyediaan makanan dan minuman	DPMPPTSP	Tersedianya makanan dan minuman Pegawai	100%	90.000.000		Penyediaan makanan dan minuman	DPMPPTSP	Tersedianya makanan dan minuman Pegawai	100%	151.008.000	
		8	Belanja rapat/rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	DPMPPTSP	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	100%	160.000.000		Belanja rapat/rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	DPMPPTSP	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	100%	216.990.000	
		9	Monitoring/Survey/Pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	DPMPPTSP	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	100%	110.000.000		Monitoring/Survey/Pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	DPMPPTSP	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	100%	110.000.000	
		10	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPPTSP	Tersedianya biaya rekening listrik, telepon dan air	100%	134.000.000		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPPTSP	Tersedianya biaya rekening listrik, telepon dan air	100%	134.000.000	
		11	Penyediaan jasa administrasi umum	DPMPPTSP	Tersedianya honorarium pengelola administrasi umum	100%	79.350.000		Penyediaan jasa administrasi umum	DPMPPTSP	Tersedianya honorarium pengelola administrasi umum	100%	79.350.000	
		12	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	DPMPPTSP	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	100%	7.500.000		Penyediaan peralatan kebersihan kantor	DPMPPTSP	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	100%	7.500.000	
		14	Penyediaan jasa jaringan Internet	DPMPPTSP	Lancarnya penyediaan informasi yang dibutuhkan	-	-		Penyediaan jasa jaringan Internet	DPMPPTSP	Lancarnya penyediaan informasi yang dibutuhkan	-	-	
		15	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMPPTSP	Tersedianya upah tenaga petugas kebersihan	100%	21.000.000		Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMPPTSP	Tersedianya upah tenaga petugas kebersihan	100%	21.000.000	
		16	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	DPMPPTSP	Tersedianya upah tenaga petugas jaga malam	100%	21.000.000		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	DPMPPTSP	Tersedianya upah tenaga petugas jaga malam	100%	21.000.000	
		17	Penyediaan Jasa Supir/Kernel/Operator Alat Berat	DPMPPTSP	Tersedianya upah tenaga supir	100%	22.800.000		Penyediaan Jasa Supir/Kernel/Operator Alat Berat	DPMPPTSP	Tersedianya upah tenaga supir	100%	22.800.000	
		18	Penyediaan Jasa Administrasi kantor	DPMPPTSP	Tersedianya upah tenaga administrasi kantor	100%	63.000.000		Penyediaan Jasa Administrasi kantor	DPMPPTSP	Tersedianya upah tenaga administrasi kantor	100%	102.000.000	
		II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Meubelair	DPMPPTSP	Tersedianya meubelair kantor		100%	10.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Meubelair	DPMPPTSP	Tersedianya meubelair kantor
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			DPMPPTSP	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPPTSP	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100%	50.000.000	
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional			DPMPPTSP	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	100%	50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	DPMPPTSP	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik		100%	50.000.000	
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			DPMPPTSP	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan baik	100%	50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPMPPTSP	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan baik		100%	50.000.000	
III	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Pengadaan pakaian pegawai	DPMPPTSP	Tersedianya pakaian pegawai	100%	30.000.000	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pengadaan pakaian pegawai	DPMPPTSP	Tersedianya pakaian pegawai	100%	30.000.000	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/ Sosialisasi	DPMPPTSP	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan	100%	100.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/ Sosialisasi	DPMPPTSP	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan	100%	200.000.000	
WAJIB														

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
V	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	DPMPPTSP	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	100%	250.000.000	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	DPMPPTSP	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	100%	250.000.000	
VI	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	DPMPPTSP	Terlaksananya Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	100%	30.000.000	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	DPMPPTSP	Terlaksananya Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	100%	30.000.000	
		2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	DPMPPTSP	Terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	100%	44.700.000		Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	DPMPPTSP	Terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	100%	44.700.000	
VII	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	Rapat koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kola dan Sekretariat dewan Pengupahan Kola Gunungsiloli.	DPMPPTSP	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak)	100%	40.000.000	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rapat koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kola dan Sekretariat dewan Pengupahan Kola Gunungsiloli.	DPMPPTSP	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak)	100%	40.000.000	
		2	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	DPMPPTSP	Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	10.000.000		Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	DPMPPTSP	Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	10.000.000	
		3	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	DPMPPTSP	Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100%	20.000.000		Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	DPMPPTSP	Terlaksananya Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100%	20.000.000	
		4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	DPMPPTSP	Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	100%	20.000.000		Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	DPMPPTSP	Terlaksananya Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	100%	20.000.000	
		5	Pembinaan LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT	DPMPPTSP	Terlaksananya pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	100%	12.000.000		Pembinaan LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT	DPMPPTSP	Terlaksananya pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	100%	12.000.000	
VIII	Program Pelayanan Perizinan	1	Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	Program Pelayanan Perizinan	Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	
		2	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	DPMPPTSP	Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	100%	40.000.000		Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	DPMPPTSP	Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	100%	40.000.000	
		3	Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	DPMPPTSP	Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	100%	100.000.000		Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	DPMPPTSP	Terlaksananya Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	100%	100.000.000	
		4	Pelayanan Perizinan secara langsung di Kecamatan	DPMPPTSP	Terlaksananya pelayanan perizinan secara langsung di Kecamatan	100%	60.000.000		Pelayanan Perizinan secara langsung di Kecamatan	DPMPPTSP	Terlaksananya pelayanan perizinan secara langsung di Kecamatan	100%	60.000.000	
		5	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100%	30.000.000		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100%	30.000.000	
		6	Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	DPMPPTSP	Tersusunnya Standar Pelayanan	-	-		Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	DPMPPTSP	Tersusunnya Standar Pelayanan	-	-	
		7	Pengembangan sistem informasi perizinan	DPMPPTSP	Adanya pengembangan sistem informasi perizinan	100%	100.000.000		Pengembangan sistem informasi perizinan	DPMPPTSP	Adanya pengembangan sistem informasi perizinan	100%	100.000.000	
		8	Pengelolaan perizinan oleh Tim Teknis	DPMPPTSP	Terbilnya berita acara pemeriksaan (BAP) dan rekomendasi perizinan	100%	150.000.000		Pengelolaan perizinan oleh Tim Teknis	DPMPPTSP	Terbilnya berita acara pemeriksaan (BAP) dan rekomendasi perizinan	100%	150.000.000	
IX	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Keikutsertaan dalam Kegiatan Promosi Investasi	DPMPPTSP	Keikutsertaan dalam kegiatan Promosi Investasi	-	-	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Keikutsertaan dalam Kegiatan Promosi Investasi	DPMPPTSP	Keikutsertaan dalam kegiatan Promosi Investasi	-	-	
		2	Pembuatan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi	DPMPPTSP	Adanya sarana dan prasarana promosi investasi daerah	-	-		Pembuatan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi	DPMPPTSP	Adanya sarana dan prasarana promosi investasi daerah	-	-	
		3	Publikasi Layanan Perizinan melalui Media Elektronik	DPMPPTSP	Terpublikasinya layanan perizinan melalui media elektronik	-	-		Publikasi Layanan Perizinan melalui Media Elektronik	DPMPPTSP	Terpublikasinya layanan perizinan melalui media elektronik	-	-	
		4	Pembuatan Brosur-brosur Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP	Adanya brosur-brosur perizinan dan non perizinan	-	-		Pembuatan Brosur-brosur Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP	Adanya brosur-brosur perizinan dan non perizinan	-	-	
		5	Pembuatan Kalender Perizinan	DPMPPTSP	Adanya kalender perizinan	-	-		Pembuatan Kalender Perizinan	DPMPPTSP	Adanya kalender perizinan	-	-	
X	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1	Penyusunan Kajian Potensi Investasi Daerah	DPMPPTSP	Tersusunnya buku kajian potensi investasi daerah	-	-	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penyusunan Kajian Potensi Investasi Daerah	DPMPPTSP	Tersusunnya buku kajian potensi investasi daerah	-	-	
		2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Insentif Penanaman Modal Daerah	DPMPPTSP	Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Insentif Penanaman Modal Daerah	-	-		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Insentif Penanaman Modal Daerah	DPMPPTSP	Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Insentif Penanaman Modal Daerah	-	-	
		3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	DPMPPTSP	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	-	-		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	DPMPPTSP	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	-	100.000.000	
		4	Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPPTSP	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-		Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPPTSP	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	
		5	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Penanaman Modal	DPMPPTSP	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan di Bidang Penanaman Modal	-	-		Sosialisasi Kebijakan di Bidang Penanaman Modal	DPMPPTSP	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan di Bidang Penanaman Modal	-	-	

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		6 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal	DPMPPTSP	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal	-	-		Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal	DPMPPTSP	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal	-	-		
JUMLAH KESELURUHAN						2.111.710.000	JUMLAH KESELURUHAN						2.473.708.000	

Gunungsitoli, 30 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA GUNUNGSITOLI,



DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si
PEMESINA
NIP. 19751213 200112 2 005

TABEL C.1.8
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
dan Perkiraan Maju Tahun 2019
Provinsi/Kabupaten/Kota Gunungsitoli

Nama Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR/ TARGET TAHUN 2018	Rencana Tahun 2018				CATATAN	Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
12	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.040.610.300					
12	01	01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya materi, peranko dan benda pos lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	6.012.000	DAU		4 jenis	6.024.024
12	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	100.200.000	DAU		90 jenis	100.400.400
12	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	80.510.700	DAU		12 jenis	80.671.721
12	01	01	12	Penyediaan komponen-komponen instalasi, listrik penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	10.020.000	DAU		12 jenis	10.040.040
12	01	01	15	Penyediaan bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya biaya bahan bacaan surat kabar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	5.010.000	DAU		2 Jenis	5.020.020
12	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman Pegawai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	151.000.000	DAU		40 orang	160.000.000
12	01	01	18	Belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	212.339.000	DAU		90 OH	160.640.640
12	01	01	19	Monitoring/Survey/Pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	110.220.000	DAU		500 OH	100.400.400
12	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya rekening listrik, telepon dan air	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	134.268.000	DAU		6 jenis	134.536.536
12	01	01	20	Penyediaan jasa administrasi umum	Tersedianya honorarium pengelola administrasi umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	93.460.000	DAU		13 orang	79.667.717
12	01	01	16	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	7.515.000	DAU		25 jenis	7.530.030
12	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	2.000.000	DAU		-	
12	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya upah tenaga petugas kebersihan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	21.042.000	DAU		1 orang	21.084.084
12	01	01	22	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya upah tenaga petugas jaga malam	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	21.042.000	DAU		1 orang	21.084.084

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR/ TARGET TAHUN 2018	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	01	23	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	Tersedianya upah tenaga supir	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	22.845.600	DAU		1 orang	22.891.291
12	01	01	21	Penyediaan Jasa Administrasi kantor	Tersedianya upah tenaga administrasi kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	63.126.000	DAU		3 orang	63.252.252
12	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				200.220.000				
12	01	02	10	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	20.020.000	DAU		5 jenis	15.050.040
12	01	02	11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	80.000.000	DAU		15 jenis	50.200.200
12	01	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	50.100.000	DAU		5 Unit	50.200.200
12	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan baik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	50.100.000	DAU		15 jenis	50.200.200
1	20	03		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				34.000.000				
1	20	03	01	Pengadaan pakaian pegawai	Tersedianya pakaian pegawai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	34.000.000	DAU		34 stel	34.000.000
1	20	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				112.500.000				
1	20	05	01	Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/ Sosialisasi	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparaturnya pelayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	112.500.000	DAU		50 OH	126.804.680
1	20			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi				90.000.000				
1	20			Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya pameran investasi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-		-	-
1	20			Keikutsertaan dalam Kegiatan Promosi Investasi	Keikutsertaan dalam kegiatan Promosi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-		1 kali	66.625.000
1	20			Pembuatan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi	Adanya sarana dan prasarana promosi investasi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	50.000.000	DAU		1 buku, 1 CD	51.250.000
1	20			Publikasi Layanan Perizinan melalui Media Elektronik	Terpublikasinya layanan perizinan melalui media elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	15.000.000	DAU		750 kali siar	15.375.000
1	20			Pembuatan Brosur-brosur Perizinan dan Non Perizinan	Adanya brosur-brosur perizinan dan non perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	15.000.000	DAU		1 paket	15.375.000
1	20			Pembuatan Kalender Perizinan	Adanya kalender perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	10.000.000	DAU		1 paket	10.250.000
1	20			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				275.000.000				
1	20			Penyusunan Kajian Potensi Investasi Daerah	Tersusunnya buku kajian potensi investasi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-		1 buku	123.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR/ TARGET TAHUN 2018	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan insentif Penanaman Modal Daerah	Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan insentif Penanaman Modal Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	175.000.000	DAU		1 draft	-
1	20			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	100.000.000	DAU		1 buku	-
1	20			Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-		1 kali	25.000.000
1	20			Sosialisasi Kebijakan di Bidang Penanaman Modal	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan di Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-		1 kali	50.000.000
1	20			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-		1 draft	40.000.000
WAJIB												
1	20			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				120.000.000				
1	20			Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	120.000.000	DAU		-	-
1	20			Program Peningkatan Kesempatan Kerja				10.000.000				
1	20			Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Terlaksananya penyebaran informasi bursa tenaga kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	10.000.000	DAU		-	-
1	20			Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				80.000.000				
1	20			Rapat koordinasi tim dewan pengupahan kota dan sekretariat dewan pengupahan kota Gunungsitoli	Terlaksananya penetapan upah minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen hidup layak)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	40.000.000	DAU		-	-
1	20			Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	10.000.000	DAU		-	-
1	20			Pembinaan LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT	Pembinaan pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	30.000.000	DAU		-	-
1	20			Program Pelayanan Perizinan				537.669.700				
1	20			Pengelolaan perizinan oleh tim teknis	Terbitnya berita acara pemeriksaan (BAP) dan rekomendasi perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	150.300.000				
1	20			Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	40.080.000	DAU		2 dok	40.160.160
1	20			Sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta ketenagakerjaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	100.000.000	DAU		6 Kec	100.400.400

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR/ TARGET TAHUN 2018	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	CATATAN	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20			Pelayanan Perizinan secara langsung di Kecamatan	Terlaksananya pelayanan perizinan secara langsung di Kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	60.120.000	DAU		5 Kec	60.240.240
1	20			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	30.078.000	DAU		1 draft	30.120.120
1	20			Pelaksanaan pelayanan PATEN	Terlaksananya pelayanan PATEN di setiap kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	107.000.000	DAU			
1	20			Penanganan pengaduan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	20.091.700	DAU		2 dok	40.160.160
1	20			Pengembangan sistem informasi perizinan	Terlaksananya pengembangan sistem informasi perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	30.000.000	DAU		6 Kec	100.400.400

Gunungsitoli, 30 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA GUNUNGSITOLI,



DESLAWATI ZEGA, SH,M.Si
Pembina
NIP. 19751213 200112 2 005

Tabel C.1.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kota Gunungsitoli

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	PROGRAM	RANCANGAN AWAL RKPD					
		NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3		4		7	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa surat menyurat	DPMPPTSP	Tersedianya material, peranko dan benda pos lainnya	100%	6.012.000
		2	Penyediaan alat tulis kantor	DPMPPTSP	Tersedianya alat tulis kantor (ATK)	100%	100.200.000
		3	Pemeliharaan jasa dan perizinan kendaraan dinas operasional	DPMPPTSP	Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	2.000.000
		4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DPMPPTSP	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	80.510.700
		5	Penyediaan komponen-komponen instalasi, listrik penerangan kantor	DPMPPTSP	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor	100%	10.020.000
		6	Penyediaan bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMPPTSP	Tersedianya biaya bahan bacaan surat kabar	100%	5.010.000
		7	Penyediaan makanan dan minuman	DPMPPTSP	Tersedianya makanan dan minuman Pegawai	100%	151.000.000
		8	Belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	DPMPPTSP	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	100%	212.339.000
		9	Monitoring/Survey/Pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	DPMPPTSP	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	100%	110.220.000
		10	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DPMPPTSP	Tersedianya biaya rekening listrik, telepon dan air	100%	134.268.000
		11	Penyediaan jasa administrasi umum	DPMPPTSP	Tersedianya honorarium pengelola administrasi umum	100%	93.460.000
		12	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	DPMPPTSP	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	100%	7.515.000
		13	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMPPTSP	Tersedianya honorarium tenaga petugas kebersihan	100%	21.042.000
		14	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	DPMPPTSP	Tersedianya honorarium tenaga petugas jaga malam	100%	21.042.000
		15	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	DPMPPTSP	Tersedianya honorarium tenaga supir	100%	22.845.600
		16	Penyediaan Jasa Administrasi kantor	DPMPPTSP	Tersedianya honorarium tenaga administrasi kantor	100%	63.126.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pengadaan Meubelair	DPMPPTSP	Tersedianya meubelair kantor	100%	20.020.000
		2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPPTSP	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	80.000.000
		3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	DPMPPTSP	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	100%	50.100.000
		4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPMPPTSP	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan baik	100%	50.100.000
III	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1	Pengadaan pakaian pegawai	DPMPPTSP	Tersedianya pakaian pegawai	100%	34.000.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/ Sosialisasi	DPMPPTSP	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pelayanan	100%	112.500.000
V	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	Pembuatan Sarana dan Prasarana Promosi Investasi	DPMPPTSP	Keikutsertaan dalam kegiatan Promosi Investasi	100%	50.000.000
		2	Publikasi Layanan Perizinan melalui Media Elektronik	DPMPPTSP	Adanya sarana dan prasarana promosi investasi daerah	100%	15.000.000
		3	Pembuatan Brosur-brosur Perizinan dan Non Perizinan	DPMPPTSP	Terpublikasinya layanan perizinan melalui media elektronik	100%	15.000.000
		4	Pembuatan Kalender Perizinan	DPMPPTSP	Adanya brosur-brosur perizinan dan non perizinan	100%	10.000.000
VI	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Insentif Penanaman Modal Daerah	DPMPPTSP	Tersusunnya rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Insentif Penanaman Modal Daerah	100%	175.000.000
		2	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	DPMPPTSP	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	100%	100.000.000
WAJIB							
VII	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	DPMPPTSP	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	100%	120.000.000
VIII	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	DPMPPTSP	Terlaksananya Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	100%	10.000.000
IX	Program Pelayanan Perizinan	1	Pengelolaan perizinan oleh tim teknis	DPMPPTSP	Terbitnya berita acara pemeriksaan (BAP) dan rekomendasi perizinan	100%	150.300.000
		2	Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPMPPTSP	Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	40.080.000
		3	Sosialisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan nonperizinan serta ketenagakerjaan	DPMPPTSP	Terlaksananya Sosialisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta ketenagakerjaan	100%	100.000.000

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3		4		7

		4	Pelayanan Perizinan secara langsung di Kecamatan	DPMPPTSP	Terlaksananya pelayanan perizinan secara langsung di Kecamatan	100%	60.120.000
		5	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	DPMPPTSP	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100%	30.078.000
		6	Pelaksanaan Layanan PATEN	DPMPPTSP	Terlaksananya layanan PATEN di setiap kecamatan	100%	107.000.000
		7	Penanganan pengaduan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan	DPMPPTSP	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan	100%	20.091.700
		8	Pengembangan sistem informasi perizinan	DPMPPTSP	Terlaksananya pengembangan sistem informasi perizinan	100%	30.000.000
X	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	Rapat koordinasi Tim Dewan Pengupahan Kota dan Sekretariat dewan Pengupahan Kota Gunungsitoli.	DPMPPTSP	Terlaksananya Penetapan Upah Minimum (UMK) dan survey KHL (Komponen Hidup Layak)	100%	40.000.000
		2	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	DPMPPTSP	Terlaksananya Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	10.000.000
		3	Pembinaan LKS (Lembaga Kerjasama) TRIPARTIT	DPMPPTSP	Terlaksananya pembinaan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan	100%	30.000.000
JUMLAH KESELURUHAN							2.500.000.000

Gunungsitoli, 30 Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA GUNUNGSITOLI,



DESLAWATI ZEKA, SH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19751213 200112 2 005

